

# ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI JAMBI SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH

Oleh:

Zesmi Kusmila<sup>1)</sup>, Mukhzarudfa<sup>2)</sup>, Yudi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018,  
<sup>2&3)</sup> Dosen Pembimbing

## ABSTRACT

*This study aims to compare the financial performance of Local Government in Jambi Province before and after the expansion of the region. Financial performance has to be a measure of success over division policies that have been taken by Local government. Financial performance is compared through the Regional Independence Ratio, fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio. contained in the Budget Realization Report of each district, which became the object of research here is the existing division of the district in Jambi District Of Kerinci District, Merangin District, Bungo District, Batanghari District and Tanjung Jabung Barat District.*

*Research method used in different test with Paired Sample t-test. To analyze five districts in Jambi Province during the period of regional expansion of each district. Test results show that all districts have no comparasion on financial performance as measured by Independence Ratio, fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio district between before and after the expension of territory.*

**Keywords:** *Financial Performance, Independence Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Effectiveness Ratio, And Efficiency Ratio.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Kinerja keuangan telah menjadi ukuran keberhasilan atas kebijakan divisi yang telah diambil oleh pemerintah lokal. Kinerja keuangan dibandingkan melalui Rasio Kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efesiensi. terkandung dalam Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kabupaten, yang menjadi objek peniliti disini yaitu Kabupaten Pemekaran yang ada di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupatenbatanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah uji beda dengan *Paired Sample t-test* untuk menganalisis lima Kabupaten di Provinsi Jambi selama periode pemekaran wilayah dari masing-masing kabupaten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh kabupaten tidak terdapat perbandingan pada kinerja keuangan yang di ukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efesiensi kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi , Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Keberhasilan otonomi daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun (PP No 32 Tahun 2004).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu : Faktor manusia, Faktor keuangan, Faktor peralatan dan Faktor organisasi. Berdasarkan keempat faktor penelitian ini hanya membahas tentang faktor keuangannya saja dengan menghitung kinerja keuangan daerah dalam mengatur, mengurus, dan membiayai rumah tangganya. Masalah yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum mampu berperan secara baik dalam mendorong laju pembangunan daerah. Selain itu banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas hal ini dikarenakan masih lemahnya perencanaan anggaran daerah (Kaho,2012).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena paling mencolok dari adanya penerapan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah (Pemda) yang tinggi pada pemerintah pusat. Ketergantungan terlihat jelas dari aspek keuangan bahwa pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak (*local disrection*) untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah.

Halim (2012) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2012). Kajian empirik yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah kabupaten antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, rasio efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi pendapatan.

Otonomi daerah sangat berhubungan dengan pola pengaturan wilayah, dimana pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru (DOB) berdasarkan UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI Nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000. Pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak, meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya (Bappenas, 2008).

Pemekaran wilayah merupakan salah satu aspek dari adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia sendiri, pemekaran wilayah berkembang secara intensif sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pemekaran wilayah juga harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah memiliki kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial, politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi suatu pembentukan daerah otonom baru, adanya pemekaran

wilayah juga akan merubah suatu pola belanja aparatur dan pembangunan. Yang mana meningkatkan serta menciptakan permintaan barang dan jasa baru, sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi tersebut merupakan salah satu dampak pemekaran wilayah, masih ada beberapa dampak baik positif maupun negatif dari adanya pemekaran wilayah. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai dampak pemekaran wilayah, terlebih dahulu perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari adanya pemekaran wilayah.

Tujuan dari pemekaran wilayah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000, dimana dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
2. Peningkatan kehidupan demokrasi
3. Peningkatan pengelolaan potensi suatu wilayah, dan
4. Peningkatan keamanan serta ketertiban

Keberhasilan otonomi ini menunjukkan kesadaran partisipasi masyarakat Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembayaran pajak baik itu dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, maupun pajak parkir. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Jawa Barat oleh Hadi Sasana (2011).

Pada tabel di atas terlihat Pendapatan setelah pemekaran cenderung meningkat dengan sebaik-baiknya, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menunjukkan gambaran langkah konkret Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik (Mahmudi, 2010). Semua potensi yang dimiliki dapat dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin meningkat pendapatan menandakan bahwa pemerintah daerah sudah dapat menggali beberapa potensi penerimaan daerah (Galih Wicaksono, 2017). Pada umumnya pendapatan memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pendapatan yang merupakan sumber-sumber keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah. peningkatan belanja ini

menunjukkan bahwa tingginya agresivitas pemerintah daerah setempat dalam membelanjakan pendapatan daerah untuk pembangunan.

Dana perimbangan sampai saat ini masih merupakan sumber penerimaan daerah paling besar dalam rangka membiayai belanja daerah. Dana perimbangan sampai saat ini masih merupakan sumber penerimaan daerah paling besar dalam rangka membiayai belanja daerah. Setelah pemekaran Dana perimbangan cenderung positif meningkat namun berfluktuatif ini menunjukkan Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menunjukkan bahwa hubungan semakin tinggi dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Sejalan dengan penelitian Indah Puspa Sari (2016). Dimana dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran kinerja keuangan daerah yang diukur Berdasarkan Rasio Kemandirian, Desentralisasi Fiskal, Efektifitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah. Berdasarkan uraian diatas, untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut masalah kinerja keuangan daerah maka dalam penelitian ini berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Pada Kabupaten Provinsi Jambi di Diukur Dari Rasio Kemandirian, Rasio desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Pada Kabupaten Provinsi Jambi Di Diukur Dari Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Praktisi

Memberikan bukti empiris mengenai perbandingan kinerja keuangan Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Pada Kabupaten di Provinsi Jambi.

#### 1.4.2. Manfaat akademisi

Memberikan masukan, wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Daerah dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang relevan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Teori Legitimasi

Sinaga (2011) keterbukaan informasi merupakan salah satu yang menjadi fokus perhatian masyarakat. Semangat reformasi di bidang keuangan dan berbagai lingkungan telah mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja pemerintah. Perubahan tersebut antara lain dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan.

#### 2.1.2. Konsep Keuangan Daerah

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

#### 2.1.3. Konsep Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim,2012).

#### 2.1.4. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mahsun (2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### 2.1.5. Analisis Rasio Keuangan Pada APBD

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

##### 2.1.5.1. Rasio Kemandirian

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Kriteria Penilaian**  
**Kemandirian Keuangan Daerah**

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0,00 - 25,00	Rendah Sekali
25,01 - 50,00	Rendah
50,01 - 75,00	Sedang
75,01 - 100,00	Tinggi

##### 2.1.5.2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi,2010). Total penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan asli daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Kriteria Penilaian**  
**Tingkat Desentralisasi Fiskal**

Penilaian PAD Terhadap TPD (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2010)

#### 2.1.5.3. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Halim, 2012). Realisasi pendapatan adalah pencapaian target pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi riil, yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Transfer, dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan asli daerah (PAD) efektif apabila rasio yang mencapai 100 atau 100%. Semakin besar rasio efektifitas maka kinerja pemerintahpun semakin baik (Mahsun, 2006).

Rasio Efektifitas dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Efektifitas pengelolaan keuangan daerah seperti Tabel berikut:

**Tabel 3.**  
**Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas**

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

#### 2.1.5.4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisien biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi pendapatan. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Mardiasmo, 2013).

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. (Halim,2012).

Rasio Efisiensi dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Kriteria Penilaian Efisiensi**

Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat efisien

Sumber: Halim (2012)

### 2.1.6. Konsep Pemekaran Wilayah

Mengkaji tentang pemekaran tidak lepas dari istilah keruangan. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah, yang dimaksud ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan gangguan ketika manusia berhubungan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga serta biaya untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga semakin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi atau karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. (Agusniar, 2006) Terciptanya wilayah administrasi baru secara logika harus dapat menciptakan hal sebagai berikut:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelolah potensi sumber daya wilayah
2. Partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat meningkat
3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya
4. Akumulasi dari nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan masyarakat meningkat
5. Prinsip keadilan dan kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

### 2.2. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan Kinerja Keuangan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Provinsi Jambi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi. Dari Masing-Masing Kabupaten Tersebut Diambil Rentang Waktu Pengamatan Selama 3 Tahun Sebelum Dan 3 Tahun Setelah Pemekaran Wilayah, Kemudian ditarik kesimpulan berkenaan dengan Kinerja Keuangan dan selanjutnya dibandingkan kinerja keuangan tersebut antara sebelum dengan sesudah pemekaran.

Dengan Perbedaan Tahun Amatan Masing-Masing Daerah Sebagai Berikut:

1. Kabupaten Kerinci Melakukan Pemekaran Wilayah pada Tahun 2009 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, Kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Kabupaten Merangin melakukan pemekaran wilayah pada tahun 1999 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
3. Kabupaten Bungo melakukan pemekaran wilayah pada tahun 1999 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
4. Kabupaten Batanghari melakukan pemekaran wilayah pada tahun 1999 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pemekaran pada tahun 1999 maka periode amatan sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

### 3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara pengambilan data yang dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi (BPK) Pemerintah Provinsi Jambi dan menggunakan pendekatan deskriptif metode studi kasus yaitu suatu yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. (Yin,2008).

### 3.3. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian untuk mengukur Kinerja Keuangan daerah penulis menggunakan beberapa indikator yaitu: Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi.

#### 3.3.1. Rasio Kemandirian

Kemandirian ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah (Halim,2012). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2012).

### 3.3.2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Mahmudi,2010).

Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010).

### 3.3.3. Rasio Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim,2012). Rasio Efektivitas dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumbe: Halim(2012).

### 3.3.4. Rasio Efisiensi

Efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisien biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi pendapatan (Halim,2012). Rasio Efisiensi dihitung dengan formulasi sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2012)

**Tabel 5.**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Defenisi/Konsep Variabel	Skala Pengukuran
Analisis rasio keuangan sebelum dan setelah pemekaran	Kemandirian	Rasio
	Desentralisasi Fiskal	Rasio
	Efektifitas	Rasio
	Efisiensi	Rasio

## 3.4. Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data

### 3.4.1. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dimana data diperoleh. dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari:

1. Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi
2. Situs Resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan yaitu [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
3. Situs Resmi Provinsi Jambi, yaitu [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)
4. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.4.2. Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder (Sarwono,2006) yaitu data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah di Provinsi Jambi yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pemekaraan di Provinsi Jambi yang diperlukan oleh peneliti.

## 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian (Sekaran, 2007).

### 3.5.1. Uji Normalitas

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, dalam hal ini dengan menggunakan uji beda rata-rata dua sampel independen (*independent sample t-test*). Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan di analisis harus berdistribusi normal. . Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data (Sugiyono, 2011).

### 3.5.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *paired Sample t-test* untuk menguji perbedaan kinerja keuangan pemerintah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software SPSS*. Digunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan (*paired*). Hal ini dapat berarti menguji kemampuan dari hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel.

Untuk menginterpretasikan *t-test* terlebih dahulu harus ditentukan nilai  $\alpha$  dan  $df$  (*degree of freedom*) =  $N-k$  dimana untuk *paired sample t-test*  $df=N-1$ . Kemudian bandingkan nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel dengan ketentuan apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau  $-t$  hitung  $>$   $-t$  hitung maka berarti berbeda ( $H_0$  ditolak). dan apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel atau  $-t$  hitung  $<$   $-t$  tabel maka berarti tidak terdapat berbeda secara signifikan ( $H_0$

diterima). Kemudian  $H_0$  diterima jika  $P \text{ value} > 0,05$  dan  $H_0$  ditolak jika  $P \text{ value} < 0,05$ .

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jambi secara resmi dibentuk pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958. Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara  $0^\circ 45' \text{ LS} - 2^\circ 45' \text{ LS}$  dan  $101^\circ 10' \text{ BT} - 104^\circ 55' \text{ BT}$ . Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Berdasarkan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Jambi yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur, dan dengan demikian dikategorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Daerah yang mandiri adalah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain dari Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, pembiayaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berarti sumber pembiayaan pembangunan daerah tidak semata-mata tergantung dari pembiayaan yang bersumber dari APBN, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok daerahnya. Pembangunan Provinsi Jambi bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui misi pembangunan Provinsi Jambi diantaranya mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dengan memperkuat

perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah. Oleh karena itu, untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif. Luas wilayah Provinsi Jambi  $53.435 \text{ Km}^2$  dengan luas daratan  $50.160 \text{ Km}^2$  dan luas perairan sebesar  $3.274,95 \text{ Km}^2$ . Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten atau kota. dan lima kabupaten merupakan wilayah pemekaran. Yakni Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Tabel 6.**  
**Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi**

No	Kabupaten	Keterangan
1	Kerinci	Tanggal peresmian pemekaran pada 8 Oktober 2009.
2	Merangin	Kabupaten Merangin ini merupakan pemekaran dari Kabupaten sarolangun dan Bangko pada tahun 1999.
3	Bungo	Kabupaten Bungo, Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999.
4	Batanghari	Kabupaten ini dimekarkan menjadi Ibukota Muara Bulian pada tahun 1999.
5	Tanjung Jabung Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimekarkan menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tanggal 21 Oktober 1999.

Sumber: Data diolah (lampiran)

##### 4.2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

###### 4.2.1. Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan Pendapatan. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.**  
**Rasio Kemandirian Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi (%)**

Tahun	Kerinci	Merangin	Bungo	Batanghari	Tanjung Jabung Barat
t-1	36,63	112,17	90,13	601,49	59,63
t-2	34,49	292,43	82,86	179,31	55,12
t-3	31,24	62,18	116,03	944,90	292,43
Rata-rata Sebelum	34,12	155,50	96,34	575,23	135,72
t+1	104,08	102,34	160,67	101,90	61,98
t+2	70,08	87,62	205,22	988,98	805,96
t+3	118,14	146,14	538,13	251,17	45,17
Rata-rata Setelah	97,43	112,03	301,34	447,35	304,37

Sumber: Data diolah



Berdasarkan tabel 7 di atas data yang diperoleh Rasio Kemandirian secara rata-rata dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbandingan kinerja keuangan menjadi lebih baik dari periode sebelumnya namun masih dalam konteks kategori yang rendah. Ini dapat dilihat dari rata-rata (mean) dari setiap rasio Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 4.2.2. Rasio Desentralisasi Fiskal

**Tabel 8.**  
**Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi (%)**

Tahun	Kerinci	Merangin	Bungo	Batanghari	Tanjung Jabung Barat
t-1	4,28	2,18	3,04	3,90	1,72
t-2	4,04	2,99	3,59	4,46	2,11
t-3	4,24	4,56	3,35	6,54	3,87
Rata-rata Sebelum	4,18	3,24	3,32	4,96	2,56
t+1	7,24	6,64	10,04	7,53	7,31
t+2	7,64	5,73	10,44	7,02	6,93
t+3	7,14	6,51	14,30	7,50	7,67
Rata-rata Setelah	7,34	6,29	11,59	7,35	7,30

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 8 di atas data yang diperoleh secara rata-rata dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja keuangan di rasio desentralisasi namun tidak dapat diketahui apakah perbedaan atau tidak. perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat dari rata-rata (mean) dari setiap rasio Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari kelima Kabupaten Tersebut hanya Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan arah peningkatan kerja. Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batanghari Mengalami Penurunan. Namun data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

#### 4.2.3. Analisis Rasio Efektivas

**Tabel 9.**  
**Rasio Efektivitas Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi (%)**

Tahun	Kerinci	Merangin	Bungo	Batanghari	Tanjung Jabung Barat
t-1	86,79	55,46	53,87	57,68	48,01
t-2	89,80	54,68	53,43	71,07	65,99
t-3	113,04	52,14	61,40	29,35	13,25
Rata-rata Sebelum	96,84	54,09	56,9	52,7	42,41
t+1	94,29	91,88	103,64	97,22	117,84
t+2	104,04	86,54	99,02	86,02	80,77
t+3	97,92	84,01	92,92	101,47	84,37
Rata-rata Setelah	98,75	87,47	98,52	94,42	94,32

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 9 di atas data diperoleh secara rata-rata dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja keuangan di rasio efektivitas namun tidak dapat diketahui apakah perbandingan tersebut signifikan atau tidak. Perbedaan kinerja tersebut dapat dilihat dari rata-rata dari setiap rasio. Dari kelima Kabupaten Tersebut Hanya Kabupaten Merangin, Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan arah peningkatan kerja. Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo, Mengalami Penurunan. Namun data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

#### 4.2.4. Rasio Efisiensi

**Tabel 10.**  
**Rasio Efisiensi Provinsi Jambi Dalam Bentuk Persen**

Tahun	Kerinci	Merangin	Bungo	Batanghari	Tanjung Jabung Barat
t-1	130,00	99,31	94,94	81,76	102,22
t-2	119,26	102,44	97,73	73,48	99,45
t-3	121,59	99,82	99,44	71,89	97,47
Rata-rata Sebelum	123,62	100,19	97,37	75,71	99,09
t+1	105,80	98,70	87,70	93,47	90,87
t+2	115,31	99,19	90,84	97,29	110,37
t+3	110,88	99,98	99,31	96,16	107,65
Rata-rata Setelah	110,66	99,29	92,61	95,63	102,96

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 10 di atas data yang diperoleh secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan di rasio efisiensi, kinerja tersebut dapat dilihat dari rata-rata (mean) dari setiap rasio, namun tidak dapat diketahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Perbedaan. Dari kelima Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten , dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. menunjukkan arah peningkatan kerja kearah yang lebih buruk. Namun data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

Berdasarkan hasil statistik di atas maka hipotesis dapat disimpulkan seagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk Kemandirian pada sebelum dan setelah pemekaran pada pemerintah kelima Kabupaten Pemekaran yakni Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecuali Kabupaten Kerinci yang mengalami perbandingan. Namun pada peningkatan ini angka rasio masih dalam kriteria angka yang rendah yakni dibawah 10%. Daerah yang mengalami pendapatan asli daerah yang rendah dimana daerah tersebut masih bergantung pada dan pertimbangan dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan

dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan kemandirian pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Mariani (2013) tetapi sama dengan hasil yang dilakukan oleh Susantih (2009) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan indikator kemandirian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan setelah otonomi daerah.

2. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk Desentralisasi. Ini dapat dilihat dari Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kinerjanya sebelum dan setelah otonomi daerah dapat mempertahankan angka rasio nya dalam kriteria sangat baik. Hal ini mengacu pada pendapat Mahmudi (2010) yang menyatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dengan kata lain tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan terlaksana dengan baik. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Menurut Zulkarnain permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggalipotensi-potensi daerah yang ada, guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan atau pun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi pada ketiga kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu dimana peneliti menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tiga kabupaten pemekaran dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.
3. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk Efektivitas pada sebelum dan setelah pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecuali Kabupaten Batanghari yang mengalami Perbandingan sebelum dan setelah pemekaran ini bisa dilihat pada rasio sebelum pemekaran sebesar 75,71% dan setelah pemekaran sebesar 95,63%. Keberhasilan rasio efektivitas pada keempat kabupaten pemekaran Provinsi. mengaju kepada pendapat Halim (2012) yang mengatakan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, dengan kata lain pemerintah daerah pada empat kabupaten di Provinsi Jambi dalam merealisasikan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspitasari (2012) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Malang dijelaskan bahwa kinerja keuangan Kota Malang jika dilihat dari

Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kinerja Keuangan Provinsi Jambi Cukup efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk efisiensi untuk Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun sebaliknya untuk Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin yang mengalami perbandingan kearah yang lebih buruk. Sebelumnya pemekaran dalam kriteria sangat efisien dan setelah pemekaran justru cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kurang efisien dalam menentukan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan yang diterimanya. Berkurangnya penerimaan sumber asli daerah pemekaran untuk terus menggali potensi daerahnya, sedangkan biaya yang akan dikeluarkan semakin meningkat seiring dengan usaha peningkatan pendapatan pemerintah daerah pemekaran tersebut seperti seperti meningkatnya biaya pemungutan pendapatan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil yang dilakukan oleh Mariani (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan efisiensi anggaran daerah lama dengan anggaran daerah baru sesudah adanya pemekaran.

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dan menghubungkannya ke faktor-faktor yang mendukung dan tidak mendukung pemberlakuan pemekaran wilayah menurut sumber dari ahli dalam hal ini oleh Dr.Made Suwandi Msoc. Sc jurnal otonomi daerah maka dikemukakan beberapakesimpulan berikut ini antara lain:

#### 1. Kepegawaian Pemda

Terbatasnya jumlah PNS yang sarjana dan profesional, terutama untuk bidang teknis penganggaran, akuntansi dan pengelolaan keuangan merupakan tantangan yang berat, terutama dalam menetapkan peraturan yang didasari ide-ide yang kompleks (misalnya : penganggaran berbasis kinerja, akuntansi berbasis akrual). Perubahan peraturan tentang keuangan daerah tidak dapat disikapi secara langsung oleh SDM-nya. Ini dapat dilihat dari lamanya penyusunan laporan anggaran dan realisasi dari jadwal yang ditetapkan.

#### 2. Keuangan Daerah

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam seluruh siklus keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM buruknya

Koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah pada bab sebelumnya tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk Kemandirian Kabupaten Pemekaran pada sebelum dan setelah pemekaran yang ada di Provinsi Jambi kelima Kabupaten Pemekaran yakni Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecuali Kabupaten Kerinci yang mengalami perbedaan. Namun pada peningkatan ini angka rasio masih dalam kriteria angka yang rendah yakni dibawah 10%. Daerah yang mengalami pendapatan asli daerah yang rendah dimana daerah-daerah tersebut masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan kemandirian pengelolaan keuangan daerahnya.
2. Tidak terdapat perbandingan kinerja keuangan dalam bentuk Desentralisasi Ini dapat dilihat dari lima Kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kinerjanya sebelum dan setelah otonomi daerah dapat mempertahankan angka rasio nya dalam kriteria sangat baik.
3. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk Efektivitas pada sebelum dan setelah pemekaran wilayah yang ada di Provinsi Jambi. Kecuali Kabupaten Batang Hari yang mengalami Perbedaan sebelum dan setelah pemekaran ini bisa dilihat pada rasio sebelum pemekaran sebesar 75,71% dan setelah pemekaran sebesar 95,63%. Keberhasilan rasio efektivitas pada keempat kabupaten pemekaran Provinsi Jambi. mengaju kepada pendapat Halim (2012) yang mengatakan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, dengan kata lain pemerintah daerah pada empat kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi dalam merealisasikan pendapatan asli daerah telah sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.
4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk efisiensi pada Kabupaten Pemekaran yang ada di Provinsi Jambi. Untuk Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun sebaliknya untuk Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin yang mengalami perbandingan kearah yang lebih buruk. Sebelumnya

pemekaran dalam kriteria sangat efisien dan setelah pemekaran justru cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kurang efisien dalam menentukan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan yang diterimanya. Berkurangnya penerimaan sumber asli daerah pemekaran untuk terus menggali potensi daerahnya, sedangkan biaya yang akan dikeluarkan semakin meningkat seiring dengan usaha peningkatan pendapatan pemerintah daerah pemekaran tersebut seperti meningkatnya biaya pemungutan pendapatan.

Adapun yang menjadi temuan umum yang berkaitan dengan penelitian adalah akibatnya terjadi pemekaran kabupaten pada sebelum dan sesudah pemekaran diberlakukan. Sehingga banyak daerah yang mengalami penurunan anggaran dan penurunan pendapatan asli daerah akibat semakin kecilnya wilayah yang diatur oleh pemerintah kabupaten ini. Selain itu terdapat pula beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya penurunan kinerja ini dan temuan ini di dapati dari beberapa sumber antara lain:

- 1). Terbatasnya sumber daya manusia pada pemerintahan kabupaten yang memiliki kualitas baik, sehingga ini menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan kinerja keuangan.
- 2). Pengelolaan keuangan daerah yang semakin tidak jelas akibat dari penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan daerahnya.

### 5.2. Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan selama periode 3 tahun sebelum dan setelah pemekaran.
2. Penelitian ini masih terbatas pada empat variabel penelitian yaitu kemandirian, desentralisasi, efektivitas, dan efisiensi karena keterbatasan dalam perolehan data penelitian.

Berdasarkan kesimpulan hasil dan keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- 1). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan analisis laporan keuangan lainnya sebagai alat penilaian kinerja keuangan seperti, analisis pertumbuhan (*trend*), analisis regresi dan analisis keuangan lainnya.
- 2). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus dengan obyek dan rentang waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang lebih luas tentang dampak pemekaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3). Bagi pemerintah daerah diharapkan berupaya menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada secara intensif dan aktif, meningkatnya kinerja

keuangan ini maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Adam, N.F., B.M.Umar, dan Sosilo. 2013. *Effect of Local Revenue Elasticity and General Allocation Fund on Local Expenditure Allocation (Studies in District/City of Sulawesi Tenggara 2013)*. International Journal of Business and Management Invention
- Agusniar, A. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat*. (Tesis). PascaSarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Akira. 2016 *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 (Studi Pada Tiga kabupaten Pemekaran Provinsi Bengkulu)*.Tesis
- Agusti, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Riau*. Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 10, No 2.
- Arsa, I. K. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013*. Tesis
- Andini, dkk 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*. Journal of accounting 2.
- Azhar, S.K.M,2008 *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis
- Batafor, G. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi Ntt*. Tesis
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta
- Deddy, 2006. *Pemekaran Daerah Otonomi Baru: Solusi atau Problem? Perencanaan Pembangunan Th.XII (1)*. 2006
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juanda, B. 2007. *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap APBN, Perkembangan Kinerja Daerah Otonom Baru dan Strategi Pendanaannya*. Workshop Kebijakan Pendanaan Daerah Otonom Baru Departemen Keuangan RI. Bandar Lampung.
- Juwaini, J, 2008. *Pemekaran Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).
- Halim, A, 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat. Jakarta.
- Jogiyanto, 2010. *Analisis dan Rancangan Sistem Info*. Yogyakarta
- Kaho, Y. R. 2012. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, M. 2003.. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta
- Mardiasmo. 2013. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
- Mahsun, dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Paujiah, S.P. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal*. Jurnal Magister Ilmu Akuntansi
- Praza, E. I. 2016. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Pramono,Joko, 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti, Vol.7 No 13 Juli 2014
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*.
- Rafniati, 2010. *Analisis Tingkat Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Belanja Modal Provinsi Jambi*. Tesis
- Republik Indonesia, 2003. Peraturan Pemerintah 17 Tentang *Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah*.Tesis

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

[www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Yin, R. K. 2008. *Case Study Research: Design N Methods*. Illinios : Sage Publications, Inc

Zuhro. 2009. *Pemekaran Daerah dan Implikasinya*.  
Republika. 16 Februari 2009.